

Kajian Ketimpangan Wilayah dan Hubungan dengan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat

Analysis of Regional Inequality and Its Relationship with Economic Growth in West Sumatra Province

Monsaputra

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat
Jl. Kartini No.22, Padang Pasir, Kec. Padang Bar., Kota Padang, Sumatera Barat
email korespondensi: mon_eps40@yahoo.com

Diterima tanggal : 22 April 2024 ; Disetujui tanggal : 24 Oktober 2024

ABSTRACT

Economic growth is one of the goals of development, but economic growth without equity can trigger social problems. One of the problems in a country's economy that is difficult to avoid is regional development inequality. West Sumatra Province has an unemployment rate that is still above the average and the labor force participation rate is still low. Economic growth in West Sumatra Province tends to decline relatively. This study aims to analyze the development of regional inequality in West Sumatra Province and its relationship with economic growth. This study uses a descriptive quantitative method using the Williamson's index value for regional inequality analysis, Theil's entropy index for analysis of the spread of activity across regions and correlation to determine the relationship between economic growth and inequality. The results of the study are that there has been an increase in regional inequality in West Sumatra Province and the level of distribution of activities in all regions is relatively uneven. Padang City has the most evenly distributed activity intensity while Padang Panjang City has the most unequal activity distribution. Economic growth has the effect of reducing regional inequality.

Keywords : inequality, theil index, williamson index

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tujuan dari pembangunan, tetapi pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan dapat memicu permasalahan sosial. Ketimpangan pembangunan wilayah merupakan salah satu permasalahan dalam perekonomian suatu negara yang sulit untuk dihindari. Provinsi Sumatera Barat memiliki tingkat pengangguran masih di atas rata-rata serta angka partisipasi angkatan kerja masih rendah. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat relatif cenderung menurun. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis perkembangan ketimpangan wilayah di Provinsi Sumatera Barat dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan indeks Williamson untuk analisis ketimpangan wilayah, Indeks entropi Theil untuk analisis penyebaran aktivitas di seluruh wilayah dan korelasi untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan. Hasil penelitian memperlihatkan terjadi peningkatan ketimpangan

wilayah di Provinsi Sumatera Barat dan tingkat penyebaran aktivitas di seluruh wilayah relatif kurang merata. Kota Padang memiliki sebaran intensitas aktivitas paling merata sedangkan Kota Padang Panjang memiliki sebaran aktifitas paling tidak merata. Pertumbuhan ekonomi memberi pengaruh dengan menurunkan ketimpangan wilayah.

Kata kunci : ketimpangan, indeks theil, indeks Williamson

PENDAHULUAN

Ukuran ekonomi suatu wilayah dilihat dari pertumbuhan ekonomi melalui PDRB. Wilayah yang tumbuh memperlihatkan pertumbuhan ekonomi, PDRB meningkat belum tentu masyarakat sejahtera karena peningkatan ekonomi harus lebih besar dari pertumbuhan penduduk, Pertumbuhan ekonomi memperhatikan tingkat income suatu wilayah. Daerah yang memiliki peningkatan income perkapita berarti memiliki pertumbuhan ekonomi. Daerah yang memiliki PDRB kecil akan mementingkan pertumbuhan, sedangkan bagi yang PDRB tinggi pertumbuhan ekonomi tinggi tidak lagi jadi prioritas. Pembangunan sering menjadi acuan untuk pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang belum maksimal (Tumaleno et al., 2022).

Salah satu tantangan penting dalam pembangunan nasional adalah kesenjangan antarwilayah (Nasution, 2020). Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sukezi et al., 2022). Pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rajab et al., 2021). Salah satu tujuan dari pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan dapat memicu permasalahan sosial. Ketimpangan pembangunan di setiap wilayah disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Hadju et al., 2021). Ketimpangan dapat memberi implikasi terhadap berbagai isu sosial dan politik (Bathelt et al., 2024).

Salah satu upaya untuk mengurangi ketimpangan adalah desentralisasi karena mendekatkan pemerintah kepada rakyat (Hadju et al., 2021). Kebijakan pemekaran wilayah merupakan hasil penguatan kebijakan desentralisasi (Suhartono, 2015). Perekonomian provinsi dipengaruhi perekonomian kabupaten dan kota (Arsana et al., 2020) .

Polemik antara pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan pembangunan berimbang muncul seiring berjalan waktu (Aprianoor & Muktiali, 2015). Ketimpangan pembangunan wilayah menjadi salah satu permasalahan perekonomian suatu negara, hal ini juga terjadi di Indonesia (Ridho et al., 2022).

Jumlah kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Sumatera Barat masih di atas rata-rata serta angka partisipasi angkatan kerja masih rendah (Yanti & Meirinaldi, 2021), sedangkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat tahun 2016-2019 relatif cenderung menurun (Julianto & Mukhtar, 2022). Rata-rata persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017-2021 sebanyak 6,57 % (Monsaputra, 2022). Penurunan jumlah kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi harus menjadi perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain itu untuk meningkatkan keadilan juga harus memperhatikan pemerataan pertumbuhan perekonomian. Ketimpangan pembangunan akan membuat kestabilan kondisi sosial masyarakat akan terganggu. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis perkembangan ketimpangan wilayah di Provinsi Sumatera Barat dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yaitu PDRB tahun 2010-2021, jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Untuk analisis ketimpangan wilayah menggunakan nilai indeks williamson (Fahma & Mulyo Hendarto, 2022), rumusnya adalah:

$$\text{Indeks Williamson} = \sqrt{\frac{\sum (y_i - \bar{y})^2 \cdot f_i}{\bar{y} \cdot p}}$$

Keterangan

- y_i : PDRB perkapita di Kabupaten/Kota i
- \bar{y} : PDRB perkapita di Provinsi Sumatera Barat
- f_i : Jumlah penduduk di Kabupaten/Kota i
- p : Jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat

Gambaran tentang pendapatan regional perkapita dan kesenjangan pendapatan dapat dilihat dari nilai Indeks Entropy Theil. Indeks Entropi Theil

menunjukkan seberapa besar tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi suatu daerah (Sirtama, 2021). Rumus Indeks Entropi Theil sebagai berikut:

$$\sum (y_j/Y) x \log \left[\frac{(y_j/Y)}{(x_j/X)} \right]$$

Keterangan :

- y_j : PDRB Perkapita di Kab/Kota
- y : Rata-Rata PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Barat
- x_j : Jumlah Penduduk di Kab/Kota
- x : Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan dapat diukur menggunakan Korelasi Pearson. Tujuan dari Korelasi Pearson yaitu untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara dua variabel tersebut. Rumus korelasi pearson sebagai berikut:

$$\frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\sqrt{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \cdot \sqrt{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2}}$$

Keterangan

- n : jumlah data
- Σx : total jumlah dari variabel x
- Σy : total jumlah dari variabel y

Kategori keeratan korelasi antar variabel adalah sebagai berikut:

- 0,0 < r ≤ 0,2 : korelasi sangat lemah
- 0,2 < r ≤ 0,4 : korelasi lemah
- 0,4 < r ≤ 0,7 : korelasi cukup (sedang)
- 0,7 < r ≤ 0,9 : korelasi kuat
- 0,9 < r < 1,0 : korelasi sangat kuat
- r = 1,0 : korelasi sempurna

Tahapan pengujian signifikansi koefisien korelasi (uji t) sebagai berikut:

H₀ : Tidak ada hubungan secara signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan

H₁ : Ada hubungan secara signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan

didasarkan pada taraf signifikansi tertentu (α) dan statistik uji t berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan

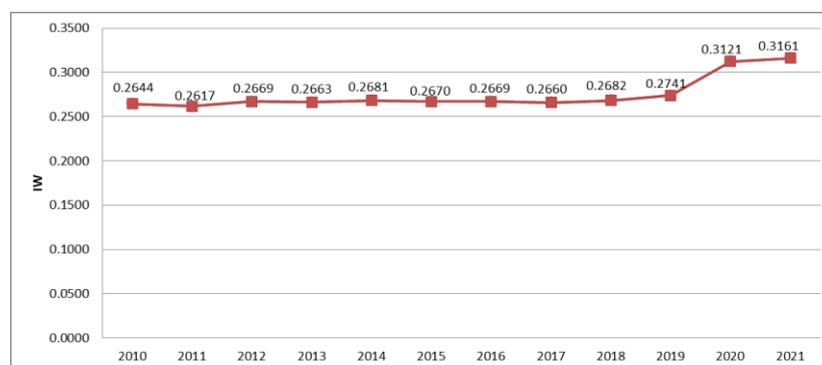
- t : t hitung
- r : koefisien korelasi
- n : jumlah data

Kesimpulan hasil pengujian adalah tolak H_0 jika t hitung $>$ t tabel, berarti ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2010-2021 terjadi peningkatan ketimpangan wilayah di Provinsi Sumatera Barat. Peningkatan ini diketahui dari meningkatnya nilai indeks Williamson terutama pada tahun 2020 dan 2021 seperti terlihat pada gambar 1, sedangkan tahun sebelumnya terjadi peningkatan dan penurunan yang relatif tidak terlalu besar. Tahun 2021 nilai indeks Williamson sebesar 0,3161, nilai ini termasuk kategori ketimpangan rendah menurut Sjafrizal (1997), tapi sudah menuju ketinggian ketimpangan sedang. Penelitian Ikhsan & Ratu (2020) juga memperlihatkan terjadinya peningkatan ketimpangan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2019. Peningkatan nilai indeks Williamson menunjukkan bahwa distribusi perekonomian antar kabupaten di Provinsi Sumatera Barat berkurang pemerataannya. Salah satu faktor yang pantas diduga sebagai penyebab meningkatnya ketimpangan ini adalah terjadinya covid 19 yang menurunkan tingkat perekonomian masyarakat. Covid 19 meningkatkan pengangguran dan kemiskinan di daerah perkotaan (Sani et al., 2022) serta covid sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Fikri & Gopar, 2021).



Gambar 1. Perkembangan ketimpangan wilayah di Provinsi Sumatera Barat
Sumber: Pengolahan data sekunder (2023)

Peningkatan ketimpangan menuju kategori sedang harus menjadi perhatian karena fenomena ini memperlihatkan dibutuhkan upaya lebih maksimal untuk menekan hal ini. Sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif harus menjadi target utama peningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan.

Penambahan aktivitas menunjukkan penambahan komponen sistem atau dengan kata lain wilayah tersebut semakin berkembang jika itu terjadi pada wilayah yang memiliki berbagai aktivitas masyarakat. Perkembangan sistem dapat diidentifikasi dengan konsep entropi. Semakin tinggi entropi semakin berkembang suatu sistem.

Berdasarkan data PDRB tahun 2021 hasil entropi total dari data aktivitas per sektor di wilayah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa nilai entropi sebesar 2,6657 seperti terlihat pada Tabel 1. Nilai entropi tersebut belum mencapai nilai entropi maksimum, karena dengan 17 komponen seharusnya dapat dicapai nilai entropi maksimum sebesar $\ln(17) = 5,7$. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tingkat penyebaran aktivitas di seluruh wilayah relatif kurang merata.

Tabel 1. Nilai indeks entropy Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Nilai entropy
Kabupaten Kepulauan Mentawai	0,0792
Kabupaten Pesisir Selatan	0,1410
Kabupaten Solok	0,1473
Kabupaten/Kota	Nilai entropy
Kabupaten Sijunjung	0,1192
Kabupaten Tanah Datar	0,1448
Kabupaten Padang Pariaman	0,1862
Kabupaten Agam	0,1977
Kabupaten Limapuluh Kota	0,1708
Kabupaten Pasaman	0,1084
Kabupaten Solok Selatan	0,0777
Kabupaten Dharmasraya	0,1351
Kabupaten Pasaman Barat	0,1602
Kota Padang	0,4655
Kota Solok	0,0724
Kota Sawahlunto	0,0675

Kabupaten/Kota	Nilai entropy
Kota Padang Panjang	0,0661
Kota Bukittinggi	0,1363
Kota Payakumbuh	0,1058
Kota Pariaman	0,0845
	2,6657

Sumber: Pengolahan data sekunder (2023)

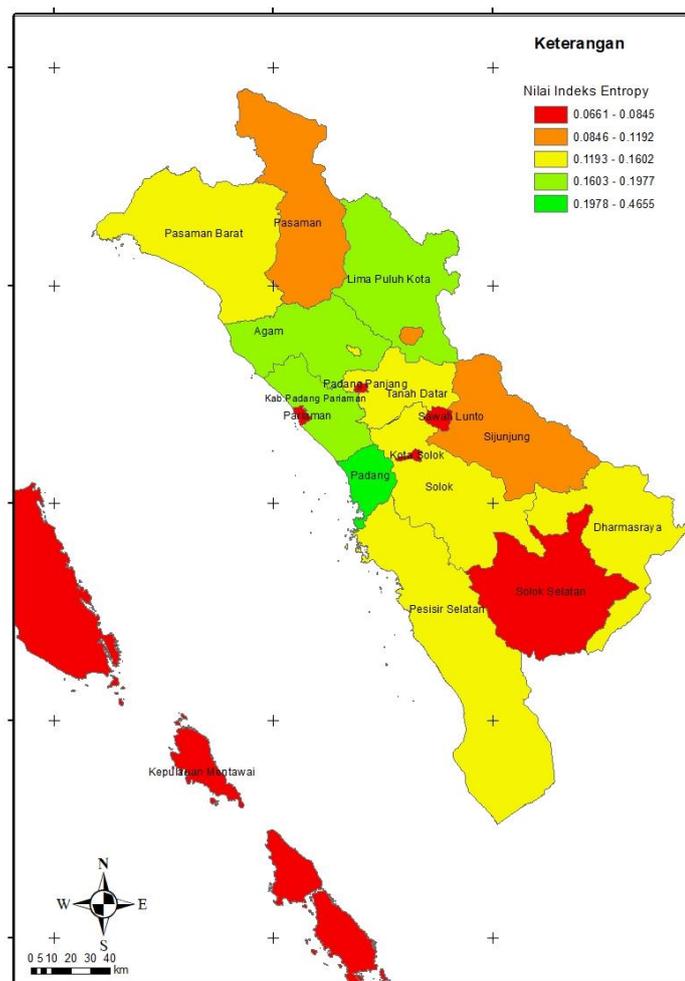
Jumlah setiap aktivitas berdasarkan Tabel 2 memperlihatkan bahwa aktivitas dengan intensitas merata di seluruh wilayah adalah sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dengan nilai entropy 0,6045. Sementara aktivitas yang relatif ada kecenderungan pemusatan lokasi adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dengan nilai entropy 0,0026.

Tabel 2. Nilai indeks entropy Sektor Perekonomian di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Sektor Perekonomian	Nilai entropy
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,6045
Pertambangan dan Penggalian	0,1104
Industri Pengolahan	0,2169
Pengadaan Listrik dan Gas	0,0034
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,0026
Konstruksi	0,2767
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,4272
Transportasi dan Pergudangan	0,2622
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,0373
Informasi dan Komunikasi	0,1731
Sektor Perekonomian	Nilai entropy
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,0835
Real Estate	0,0532
Jasa Perusahaan	0,0087
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,1850
Jasa Pendidikan	0,1227
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,0449
Jasa Lainnya	0,0533
	2,6657

Sumber: Pengolahan data sekunder (2023)

Gambar 2 memperlihatkan sebaran daerah berdasarkan nilai entropy. Dari jumlah setiap unit pengamatan dapat disimpulkan wilayah dengan sebaran intensitas aktivitas paling merata (peluang perkembangan seluruh aktivitas relatif sama) adalah Kota Padang dengan nilai entropy 0,4655. Sebaliknya wilayah dengan intensitas aktivitas paling tidak merata atau ada kecenderungan spesifikasi untuk aktivitas tertentu adalah Kota Padang Panjang dengan nilai entropy 0,0661. Salah satu penyebab hal ini adalah Kota Padang Panjang yang memiliki luas wilayah yang kecil. Kota Pariaman, Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan juga memiliki kecenderungan yang sama. Kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk bisa lebih memaksimalkan seluruh aktivitas sektor perekonomian.



Gambar 2. Sebaran nilai indeks entropy kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat
Sumber: Pengolahan data sekunder (2023)

Korelasi pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan wilayah

Tabel 3 memperlihatkan korelasi pertumbuhan ekonomi dengan nilai indeks williamson, nilai koefesien korelasinya adalah -0,841. Nilai p value 0,001, nilai ini kurang dari alpha 5%, artinya pada tingkat signifikansi 5% terdapat korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan nilai Indeks Williamson. Nilai t hitung adalah 4,915 sedangkan t tabel untuk alpha 5% adalah 2,179, nilai t hitung lebih besar dari t tabel sehingga hasil uji signifikan tolak H_0 yang berarti terdapat hubungan signifikan kedua variabel tersebut.

Analisis korelasi memperlihatkan hubungan yang negatif antara pertumbuhan dengan nilai indeks williamson, ini berarti pertumbuhan ekonomi memberi pengaruh dengan menurunnya ketimpangan wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi terdistribusi nilai manfaatnya dengan baik., Kondisi ini harus menjadi pemicu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hasil ini sejalan dengan penelitian Devi (2018) di Kabupaten Sleman, tapi berbeda dengan penelitian Sirtama (2021) yang memperlihatkan hubungan positif pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Tengah.

Tabel 3. Korelasi Pertumbuhan Ekonomi dengan Nilai Indeks Williamson

		Pertumbuhan	IW
Pertumbuhan	Pearson correlation	1	-0,841
	Sig.(2-tailed)		0,001
	N	12	12
IW	Pearson correlation	-0,841	1
	Sig.(2-tailed)	0,001	
	N	12	12

Sumber: Pengolahan data sekunder (2023)

Memfasilitasi perkembangan UMKM dan pendampingan merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hal ini akan menyentuh langsung perekonomian masyarakat secara umum. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian karena mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan nasional, memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi pengangguran (Rahman et al., 2021). Membuka akses masyarakat terhadap permodalan merupakan salah satu usaha yang bisa dilakukan untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hal ini karena salah satu kendala UMKM adalah permasalahan modal awal (Stansbury et al., 2023).

SIMPULAN

Ketimpangan wilayah di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dan tingkat penyebaran aktivitas di seluruh wilayah relatif kurang merata. Kota Padang memiliki sebaran intensitas aktivitas paling merata sedangkan Kota Padang Panjang memiliki sebaran aktifitas paling tidak merata. Pertumbuhan ekonomi memberi pengaruh dengan menurunkan ketimpangan wilayah.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat harus menjadi perhatian pemerintah untuk mewujudkan pemerataan.. Peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pemerataan. Untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi bisa dengan membuka peluang masyarakat untuk bisa dengan mudah memperoleh akses terhadap permodalan dan berbagai usaha pendampingan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianoor, P., & Muktiali, M. (2015). Kajian Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Teknik PWK*, 4(4), 484–498.
- Arsana, I. K. S., Hunta, Moh, F., Lamusu, Mohamad, F., Yasin, R., & Sadrach, Afivah, V. P. (2020). Analisis Ketimpangan Wilayah dan sektor Unggulan di Provinsi Gorontalo Tahun 2019 - 2021 dengan Metode Indeks williamson dan Location Quotient. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi Dan Pelayanan Publik*, VII(202010031), 58–64.
- Bathelt, H., Buchholz, M., & Storper, M. (2024). The nature , causes , and consequences of inter-regional inequality. *Journal of Economic Geography*, 24(March), 353–374.
- Devi, M. K. (2018). Struktur ekonomi dan disparitas wilayah Kabupaten Sleman. *kurvatek*, 03(1), 91–99.
- Fahma, B. A., & Mulyo Hendarto, R. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di Provinsi Dki Jakarta. *Diponegoro Journal of Economics*, 11(2), 67. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje>
- Fikri, Y. T. A., & Gopar, I. A. (2021). Analisis Peningkatan Angka Pengangguran akibat Dampak Pandemi Covid 19 di Indonesia. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 107–116. <https://doi.org/10.54259/ijba.v1i2.59>
- Hadju, I. I., Masinambow, V. A. ., & Maramis, M. T. . (2021). Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal*

Berkala Ilmiah Efisiensi, 21(01), 110–120.

- Ikhsan, E., & Ratu, N. Y. (2020). Struktur Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah di Provinsi Sumatera Barat. *Regional Economic Diversity*, 5(Desember), 165–179. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190130596.003.0003>
- Julianto, D., & Mukhtar, R. (2022). Analisis Pengaruh Investasi dan Jumlah Penduduk yang Bekerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2005-2020. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 01(01), 71–80. <https://www.jurnal.unidha.ac.id/index.php/JPPISB/article/download/500/303>
- Monsaputra. (2022). Analisis Autokorelasi Spasial Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Geografi*, 20(2), 97–106.
- Nasution, M. (2020). Ketimpangan Antar Wilayah & Hubungannya dengan Belanja Pemerintah: Studi di Indonesia. *Jurnal Budget*, 5(2), 84–102. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v5i2.101>
- Rahman, A. N., Rohim, A. N., Ardyah Rahmawati Laras Septi, 2Khairul Asrori, Shafira Ayuning Byzura, & Sekarwati, D. A. (2021). Model Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Desa Girirejo Melalui Program Wiradesa. *Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi Vol.22*, 22(Desember), 2021. <https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1595750>
- Rajab, A., Kamarudin, J., & Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah, S. (2021). Analisis pertumbuhan ekonomi, ketimpangan wilayah dan tingkat kemiskinan. *Forum Ekonomi*, 23(4), 607–613. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI>
- Ridho, M., Zulgani, Z., & Achmad, E. (2022). Analisis ketimpangan pembangunan wilayah antar provinsi di Pulau Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 11(1), 47–58. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v11i1.14005>
- Sani, S. R., Fitri, C. D., Amri, K., Muliadi, M., & Ikhsan, I. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan: Bukti Data Panel di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 107. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.499>
- Sirtama, B. W. (2021). Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pembuktian Hipotesis Kuznets). *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 5(4), 654–664. <https://doi.org/10.22219/jie.v5i04.17810>
- Sjafrizal, S. (1997). Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional wilayah Indonesia Bagian Barat. *Jurnal Buletin Prisma*, 3(3), 27–38.
- Stansbury, A., Turner, D., & Balls, E. (2023). Tackling the UK's regional economic inequality: binding constraints and avenues for policy intervention. *Contemporary Social Science*, 18(3–4), 318–356. <https://doi.org/10.1080/21582041.2023.2250745>

- Suhartono. (2015). Ketimpangan dan Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Hasil Pemekaran: Studi Kasus di Provinsi Banten dan Gorontalo. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 33–43. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/154>
- Sukei, Widayanto, B., & Retnowati, D. (2022). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat (Studi Kasus Dusun Dukuh Desa Donokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman). *Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi*, 23(8.5.2017), 2003–2005. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>
- Tumaleno, A. F., Riazis, K. R., & Rosnawintang. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Sulawesi Tenggara. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 189–195. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i3.135>
- Yanti, N., & Meirinaldi. (2021). Determinan Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi*, 23(2), 75–102.